

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu Negara di sebabkan banyak faktor, dan melibatkan banyak aspek di masyarakat, kemajuan perekonomian Negara akan tercapai ketika melibatkan aspek pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasinya sedangkan masyarakat dapat meningkatkan dari sektor swasta yakni tabungan dan investasi, salah satu penyakit perekonomian Negara adalah kemiskinan, dan timbulnya kemiskinan ini salah satu faktornya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang tabungan, investasi dan pengelolaan keuangan.

Belakangan ini sedang hangatya isu tentang *financial literacy* atau literasi keuangan, karna secara tidak langsung pengetahuan tentang literasi keuangan dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara, kalau berbicara tentang literasi keuangan artinya kita berbicara tentang pola pikir dan *mindset*. Hal inilah yang membuat Negara-Negara maju semakin maju, karena kebanyakan Negara maju, mempunyai masyarakat yang sadar akan pentingnya literasi keuangan, sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian negaranya.

Hal inilah yang masih menjadi tugas bagi kita bersama, menyadarkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya pengetahuan tentang literasi keuangan, demi teriptanya roda perekonomian yang lebih baik dan dapat membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera.

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) Literasi keuangan adalah tingkat keyakinan, pengetahuan dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga lembaga keuangan dan produk produknya yang di tuangkan dalam pengukuran indeks. Sedangkan Menurut Kaly, hudson dan Vush (2008) dalam penelitian (Widyawati, 2012), Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat ke dalam perilaku.

Kalau di tarik benang merah dari berbagai pendapat para ahli, definisi literasi keuangan itu adalah, kesadaran, kemampuan seseorang tentang mengetahui, produk produk keuangan, lembaga keuangan, konsep, dan pengetahuan tentang mengelola sumber daya keuangan yang ada dengan baik dan benar dengan tujuan tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera, terlebih lagi pada dewasa ini sedang marak – maraknya pasar terbuka (*open market*), yang membuat kita harus lebih mempersiapkan hal hal terkait perekonomian dan keuangan lebih baik lagi untuk menghadapi globalisasi dan kehidupan masa depan yang lebih sejahtera. Banyak contoh kasus di kehidupan seseorang yang mempunyai pendapatan besar, tetapi tidak mampu mengelola

pendapatan itu dengan baik dan benar, dan hal ini akan menjadi permasalahan di masa depan nantinya.

Secara khusus literasi keuangan bukan hanya membahas tentang pengetahuan dan kemampuan, tetapi juga membahas tentang penerapan dalam perilaku kehidupan, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Didalam dunia usaha orang-orang yang paham akan literasi keuangan mempunyai pengelolaan keuangan, rancangan anggaran usaha yang lebih baik dari pada yang tidak paham akan literasi keuangan.

Tingkat literasi masyarakat Indonesia kalau di bandingkan dengan negara tetangga masih terbilang cukup ketinggalan, survey yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 tentang penggunaan produk keuangan mengatakan bahwa Indonesia berada di urutan ke-6 dari 6 negara yang di survey, dengan jumlah tingkat penggunaan produk keuangan berjumlah 20%. Jauh ketinggalan oleh Negara Singapura yang tingkat penggunaan produk keuangannya berjumlah 98%, disusul Thailand 73%, Malaysia 66%, India 35% dan Philipina 27%. Hal ini membuktikan bahwa masih jauhnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan. Dan diharapkan program-program pemerintah dapat membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tentang literasi keuangan.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga melakukan survey terkait tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia khususnya, menemukan beberapa penemuan, diantaranya:

Tabel 1.1
Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia 2013

Indeks Literasi Keuangan	Persentase (%)
<i>Well Literate</i>	21,8
<i>Sufficient Literate</i>	75,69
<i>Less Literate</i>	2,06
<i>Not Literate</i>	0,41
Total	100

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2013

Berdasarkan data di atas dilihat bahwa kategori tingkat pengetahuan literasi keuangan masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori *Sufficient Literate* sebesar 75,69%, artinya masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan, produknya, fitur-fiturnya serta mempunyai kemampuan menggunakan produk dan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan cukup baiknya pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangan, tetapi hal ini belum merata, karena masih cukup banyak masyarakat yang belum mengerti tentang lembaga, produk, manfaat dan resiko terkait keuangan tersebut.

Tabel 1.2
Indeks Literasi dan Indeks Utilitas Sektor Keuangan

Kategori \ Sektor	Perbankan	Asuran si	Perusahaan Pembiayaan	Dana Pensiun	Pasar Modal	Pegadaian
Well Literate	21,80%	17,84%	9,80%	7,13%	3,79%	14,58%
Sufficient Literate	75,44%	41,69%	17,89%	11,74%	2,40%	38,89%
Less Literate	2,04%	0,68%	0,21%	0,11%	0,03%	0,83%
Not Literate	0,73%	39,80%	72,10%	81,03%	93,79%	45,44%
Utilitas	57,28%	11,81%	6,33%	1,53%	0,11%	5,04%

Sumber: Survei Nasional Literasi Keuangan, EPK, 2013

Dilihat dari Table di atas masyarakat Indonesia secara umumnya paham akan literasi keuangan dalam kategori Sufficient Literate, dan ternyata sektor perbankan lah yang paling masyarakat pahami dan ketahui dengan jumlah 75,44% di bandingkan dengan sektor-sektor keuangan yang lain. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia tidak paham yang namanya pasar modal, dilihat dari table di atas, persentase masyarakat yang tidak paham akan literasi keuangan, khususnya pasar modal itu berjumlah 93,79%.

Salah satu aspek penting dalam kehidupan adalah kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial merupakan kecerdasan dalam mengelola keuangan dan aset pribadi (Widayati, 2012). Jika seseorang tidak cerdas dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asetnya, akan berdampak buruk bagi masa depannya, hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan hidup seseorang hingga bias

menyebabkan kemiskinan, secara tidak langsung akan berdampak pada kestabilan perekonomian Negara.

Salah satu cara pemerintah melalui OJK menyebar luaskan informasi terkait literasi keuangan adalah dengan menjalankan program SNLKI (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia). SNLKI adalah terdiri dari tiga pilar yaitu: (1) Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, (2) Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan, dan (3) Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan indkes literasi keuangan masyarakat Indonesia, yang di harapkan ketika pengetahuan tentang literasi keuangan juga dapat memacu proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hingga saat ini masih kurang efektif nya program ini berjalan, karna dirasa kalau pemerintah saja yang bergerak untuk menyadarkan masyarakat tentang literasi keuangan belum cukup, butuh banyak aspek yang membantu dalam proses edukasi keuangan ini, salah satunya adalah dari para masyarakat yang punya intelektual dari studinya yang juga dapat membantu pemerintah menyalurkan kepada masyarakat secara umumnya. Literasi Keuangan sendiri memiliki dua tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat,, *Pertama* Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate, *Kedua* Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi keuangan merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, dengan literasi keuangan pengelolaan keuangan dan asset dapat

digunakan dan di manfaatkan seefisien mungkin, termasuk kepada para pelaku UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 hingga saat ini mengalami perkembangan UMKM di Indonesia kian pesat.

Saat ini UMKM menjadi sebuah komoditi yang kuat di sektor ekonomi dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada Triwulan di tahun 2018, UMKM menyumbangkan sekitar 60% pertumbuhan ekonomi nasional, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 97%. Saking pentingnya peran UMKM sehingga menjadi motor penggerak ekonomi bangsa Indonesia pada saat ini, UMKM lah yang menjadi pertahanan ekonomi Indonesia saat terjadi krisis dunia.

Walaupun peran UMKM begitu penting di Indonesia, bukan berarti UMKM di Indonesia tidak mengalami kendala maupun masalah, kendala-kendala yang dihadapi yaitu persoalan modal, administrasi dan teknologi. Masalah administrasi yang sering dijumpai adalah terkait manajemen usaha, baik manajemen keuangan, manajemen resiko dan lain-lain. Artinya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan atau literasi keuangan dalam sebuah usaha sangatlah penting, harapannya pengetahuan tentang literasi keuangan dapat memberikan dampak positif kepada usaha para pelaku UMKM.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu Provinsi yang disematkan kata istimewa di namanya, istimewa disini maskudnya adalah dari segi pemerintahan,

budaya dan masyarakat provinsi D.I Yogyakarta tersebut. Berbicara Yogyakarta berarti kita berbicara tentang budaya dan kreatifitas. Banyak sekali kreatifitas yang lahir dan tercipta dari provinsi ini. Selain sektor pariwisata, tingkat kreatifitas warga Yogyakarta menjadi ujung tombak perekonomian Yogyakarta itu sendiri. Perkembangan UMKM di Yogyakarta kian pesat, menurut survey yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Yogyakarta dari tahun 2015 sebanyak 220.703 unit usaha, dan pada tahun 2016 menjadi 230.047 unit usaha, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017, yaitu berjumlah 238.629 unit usaha. Pada tahun 2017 kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 79,64%.

Jumlah UMKM di Yogyakarta tersebar di lima kabupaten kota, menurut survey yang dilakukan dinas koperasi dan umkm, jumlah UMKM terbanyak terletak di kabupaten Bantul dengan persentase 26%, di susul oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 22%, Kabupaten Kulonprogo sebesar 20%, Kabupaten Sleman 18%, dan yang terakhir Kota Yogyakarta sebesar 14%. Dilihat dari jumlah penyebaran UMKM di Yogyakarta terdapat dikabupaten Bantul, merupakan hal yang menarik untuk di teliti pada sektor UMKM yang ada di Kabupaten Bantul tersebut.

Kabupaten Bantul termasuk kedalam daerah unggulan dari Provinsi Yogyakarta, banyak sekali potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Yogyakarta dari kabupaten Bantul, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan hingga sektor industri kreatif. Dari tahun 2016 perekonomian Bantul menunjukkan trend positif sehingga menciptakan iklim usaha dan perdagangan

yang semakin kondusif, hal ini memberikan dampak terhadap perekonomian yang tumbuh sebesar 5,06% dari tahun sebelumnya, hal inilah yang membuat pemerintah DIY makin fokus untuk mengembangkan potensi UMKM dan industri di kabupaten Bantul.

Dilihat dari Visi Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul “PRODUK BANTUL MENJADI PRODUK UNGGULAN INDONESIA”, yang mana artinya Kabupaten Bantul benar benar serius mengelola sektor sektor yang menciptakan produk-produk unggulan nantinya, termasuk dari UMKM. Kabupaten Bantul ingin mewujudkan kreatifitas, daya saing produk UMKM dan penguatan UMKM Bantul itu sendiri. Jumlah perkembangan UMKM dibantul juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bias dilihat dari table berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah UMKM di Bantul

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Mikro	27.498	27.672	27.708	27.828
2	Usaha Kecil	11.458	11.531	11.544	11.594
3	Usaha Menengah	6.874	6.918	6.926	6.956
	Jumlah	45.830	36.121	46.178	46.378

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul 2017

Di lihat dari tabel di atas jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Setiap tahun mengalami peningkatan, walaupun peningkatan yang ada tidak terlalu signifikan, Jumlah UMKM di Bantul terus mengalami peningkatan sehingga nantinya bisa

menjadi ujung tombak perekonomian Bantul, dan cara pengelolaan usaha juga berpengaruh terhadap konsistensi dan berkembangnya suatu usaha, maka dari itu dibutuhkan pengetahuan tentang literasi keuangan. Karna literasi keuangan berpengaruh positif kepada perkembangan UMKM itu sendiri.

Permasalahan tentang pengetahuan pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam konsistensinya sebuah usaha, walaupun dengan modal besar, tetapi tanpa ilmu dan pengetahuan yang baik tentang pengelolaan modal ataupun keuangan tersebut, inilah yang nanti akan membuat para pelaku usaha mengalami gulung tikar, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para karyawan. Akan begitu kompleks ketika masalah literasi keuangan ini dipandang sepele oleh para pelaku usaha tersebut, jangan sampai sektor yang akan menjadi ujung tombak perekonomian di Bantul khususnya, malah akan menjadi boomerang terhadap perekonomian di Kabupaten Bantul itu sendiri.

Dan salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi keuangan para pelaku UMKM-nya adalah salah satunya bekerja sama dengan lembaga yang bernama Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) DIY, Dengan harapan lembaga ini dapat menjadi mediator atau tempat konsultasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan kemampuan manajerial keuangan bagi usahanya.

Dari persebaran jumlah UMKM yang ada di Yogyakarta, Kabupaten Bantul adalah Kabupaten yang paling banyak persebarannya , lalu meningkatnya jumlah UMKM di Bantul dari tahun ketahun, apakah membuat para pelaku UMKM dapat

mengelola Usahanya dengan baik dan benar? Dan sejauh manakah tingkat literasi keuangan yang ada pada para pelaku UMKM? Apakah mereka hanya sebatas menjalankan usaha tanpa mengelola keuangan dan aset seefisien mungkin?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Birawani Dwi Anggraeni (2015) dengan judul "*Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Pemilik Usaha Terhadap Pengelolaan Keuangan. Studi Kasus : Umkm Depok*" dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan dari pemilik usaha rendah sehingga berpengaruh terhadap kemampuan mengelola keuangan. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemilik usaha hanya sekedar mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha saja, tanpa penyimpanan dokumen penting yang mendukung. Dan juga pemilik usaha selama usahanya berdiri belum pernah membuat anggaran sebagai dasar evaluasi kinerja usaha mereka. Selain itu kemampuan pemilik usaha dalam mengelola kas surplus dan defisit menunjukkan mayoritas menggunakan jasa perbankan atau non perbankan. Mereka belum sampai pada tahap investasi pada produk keuangan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, daerah sekelah ibu kota negara yang notabennya mempunyai fasilitas yang lengkap di bandingkan dengan daerah lain masih saja memiliki tingkat literasi yang rendah.

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul "*Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*" yang dilakukan Diana Djuwita (2018) menemukan bahwa hanya variabel lama usaha dan jumlah karyawan yang berpengaruh signifikan terhadap financial knowledge. Seluruh

variabel demografi (lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis usaha, lama usaha, modal awal, sumber modal, pendapatan, dan jumlah karyawan) tidak mempengaruhi financial behaviour dan financial attitude para pedagang kaki lima. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan (Margaretha,2015) dengan judul Faktor Penentu Tingkat Literasi Keuangan Para Pengguna Kartu Kredit di Indonesia penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan terkait literasi keuangan. Hasil penelitian juga menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara umur, pendidikan, pendapatan terhadap literasi finansial pengguna kartu kredit. Implikasi dari penelitian ini adalah pemegang saham seperti pemerintah, universitas, dan Bank perhatian lebih untuk membuat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan melek finansial kartu kredit pengguna. Dalam dua penelitian tentang literasi keuangan ini menyatakan ada perbedaan hasil dalam variable usia / umur.dan dalam penelitian ini, penulis juga mengikutkan umur kedalam variable yang akan di teliti

Berdasarkan Latar belakang tersebut mengatakan begitu pentingnya pengetahuan tentang literasi keangan, yang membuat peneliti tertarik meneliti tentang sejauh mana tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM di kabupaten Bantul. Maka peneliti memberikan judul penelitian ini dengan “*Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pada Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*”

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan yang terdapat pada penelitian ini adalah peneliti hanya fokus menganalisis dan mengamati tingkat literasi keuangan pada para pelaku UMKM di Kabupaten Bantul, dengan menghubungkan antar variabel yang ada, seperti Gender/Jenis kelamin, Usia para pelaku, lama usaha, tingkat pendidikan dan pendapatan.

C. Rumusan Masalah

Kesimpulan dari latar belakang yang telah dibahas diatas, terdapat beberapa rumusan masalah mengenai tingkat literasi keuangan pada Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pada Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul?
2. Adakah perbedaan tingkat literasi Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan gender/jenis kelamin?
3. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan usia?
4. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan lama usaha?
5. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan?
6. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan pendapatan?

D. Tujuan Penelitian

Didalam penelitian ini ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat literasi keuangan pada Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul?
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan gender/jenis kelamin?
3. Untuk mengetahui perbedaan tngkat literasi keuangan Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan usia?
4. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan lama usaha?
5. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan?
6. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan pelaku Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Bantul berdasarkan pendapatan?

E. Manfaat Penelitian

1. Kepada Pelaku UMKM, menjadi solusi untuk menignkatan pengetahuan tentang literasi dan pemahaman keuangan
2. Kepada pemerintah dan lembaga keuangan, menjadi referensi sebelum menciptakan kebijakan, pemberian layanan, serta strategi untuk peningkatan tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM di Bantul.

3. Kepada akademisi, menjadi referensi untuk penelitian sejenis berikutnya.